

Sosialisasi Pembebasan Pokok dan Denda PKB, Kepala UPT PPD Samsat Kobar: Momentum Tepat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak



MMC Kobar – Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Samsat Pangkalan Bun, M. Ali Sofwan Nur, SE, memanfaatkan forum *Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)* yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyosialisasikan kebijakan pemutihan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025.

Kegiatan rakor yang dilaksanakan pada Rabu (11/6), bertempat di Ballroom Brits Hotel Pangkalan Bun, dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam paparannya, M. Ali Sofwan Nur menjelaskan bahwa kebijakan pemutihan pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini mencakup penghapusan pokok tunggakan dan denda PKB untuk tahun 2024 dan sebelumnya. “Kebijakan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali kendaraan yang tidak terdata secara aktif dalam sistem pajak, sekaligus mendukung validasi dan pembersihan basis data kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif fiskal kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakan tanpa beban tunggakan masa lalu.

“Program pembebasan ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat. Selain memberikan keringanan, ini juga menjadi momen penting untuk menertibkan administrasi kendaraan. Kami sangat mengharapkan dukungan aktif dari seluruh aparaturnya kecamatan dan desa dalam menyampaikan informasi ini secara luas kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ali mengingatkan bahwa program pemutihan ini bersifat terbatas waktu, sehingga wajib pajak yang masih memiliki tunggakan diimbau untuk segera memanfaatkannya. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk peran strategis aparaturnya di tingkat desa dan kecamatan dalam melakukan edukasi dan advokasi kepada warga.

Melalui forum rakor ini, pihaknya berharap dapat terbangun sinergi yang konkret antara perangkat daerah dan pemerintahan desa, sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Cerdas Pajak Bersama Sinpelaja

Lapor pajak sekarang bisa di Sentuh Pajak Kobar App lho, download sekarang di Google Play Store!